

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HAK AZASI MANUSIA DI INDONESIA

Rahmat Suhargon

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahah (STIHMA)

Email: rahmatsuhargon@stihma.ac.id

Abstrak

Pengakuan yang tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi sebenarnya sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan penulisan kajian ilmiah ini adalah untuk menelusuri dan mengkaji rumusan-rumusan yang menyangkut tentang Pengaturan Hukum Terhadap Penegakan Hak Azasi Manusia di Indonesia.

Karena Indonesia sangat menjunjung tinggi penegakan Hak Azasi Manusia maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2000 diaturlah tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa "pengadilan Hak azasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi Pengadilan Negeri yang bersangkutan". Untuk Daerah khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Hak Azasi Manusia berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan Hak Azasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat

Kata Kunci : Hak Azasi, Pengaturan, Penegakan

PENDAHULUAN

Semenjak reformasi telah ada peraturan Perundang-Undangan yang memberikan jaminan dan petunjuk dalam penyelesaian yang berhubungan dengan Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seperti yang disampaikan oleh Ambarwati (2014; 115) Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Azasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Sejauh mana HAM terwujud atau merupakan dari hukum bagian positif di Indonesia, antara lain dapat diidentifikasi dan dikaji dari pernyataan-pernyataan dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut :

Pengaturan Hukum terhadap Penegakan Hak Azasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

1. Di dalam Pembukaan

Berkaitan dengan wacana HAM di Indonesia maka dapat kita lihat dari

perspektif historis. Jika melakukan peninjauan historis terhadap proses pembentukan Negara Republic Indonesia (RI) pada tahun 1945, akan tampak bahwa masalah HAM telah mendapatkan perhatian dan bahkan menjadi bahan perdebatan yang serius. Rapat besar Doktrin Zyyunbi Tyosakai (Badan Penyelidikan Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan) yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1945 misalnya menyiapkan memori perdebatan *founding fathers* tentang perlu tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam UUD, yang kemudian hari kita kenal sebagai UUD 1945. Bayuanggono dalam tulisannya di blogspotnya menyebutkan bahwa dari perdebatan dalam BPUPKI akhirnya disepakati bahwa tentang HAM pengaturannya dimaksudkan dalam UUD 1945 yaitu dalam pasal 27 ayat (1).

Pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 syarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai



kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi. Hak azasi manusia sebenarnya sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan bahwa negara Indonesia sendiri sejak masa berdirinya tidak bisa lepas dari hak azasi manusia itu sendiri. Dapat kita lihat pada alinea pertama yang berbunyi "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa....". berdasar ini Winarno (2013;165) maka bangsa Indonesia mengakui adalah hak untuk merdeka atau bebas. Berbeda dengan sejarah Hak Azasi Manusia di barat yang lebih bersifat individual, Hak Azasi Manusia di Indonesia berpaham kolektivitas. Terbaca dari hak setiap "bangsa" untuk merdeka.

Nilai-nilai luhur bangsa yang terumus dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek, yakni aspek individualistik (pribadi dan aspek sosialitas, bermasyarakat). Kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak azasi orang lain. Berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak azasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah.

Pancasila terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan landasan idiil akan pengakuan dan jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Para pendiri negara yang tergabung dalam panitia lima, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ini perlu diberi tempat yang layak dalam Perundang-Undangan perihal hak-hak dan kewajiban asasi warga negara. Terutama sekali hak hidup, hak atas keselamatan badan, dan hak kebebasan diri, karena ketiganya nyata merupakan kurnia dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga perlu mendapat perlindungan sejauh mungkin dari negara. Hak lain seperti hak milik dan hak kehormatan seseorang lebih bersifat relatif yang bergantung pada ideologi bangsa, terutama mengenai hubungan dan perimbangan antara individu dan masyarakat. Bangsa Indonesia yang bersifat "kekeluargaan" dan "gotong

royong", tidak bisa mengakui hak milik sebagai "hak yang tidak dapat diganggu gugat dan keramat". Hak milik itu mempunyai dan bahkan bersifat "fungsi sosial", artinya mengandung pertanggung jawaban dan kewajiban-kewajiban besar terhadap Tuhan, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

Tidak secara menyeluruh dan terperinci seperti UDHR, namun di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 juga dijumpai pasal-pasal yang dapat diselaraskan dengan hak-hak asasi yang tercantum dalam UDHR. Barda Nawawi Arief (2008; 56-61) mengemukakan sebagai berikut :

- a) Ketentuan Pasal 1 (2), bahwa "kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis Permusyawaratan Rakyat identik dengan Pasal 21 (1) UDHR: *"everyone has the to take in the government of his country, directly or through freely chosen represntatives"*.
- b) Juga Pasal 3, bahwa MPR yang menetapkan UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara, identik dengan Pasal 21 (1) UDHR di atas.
- c) Pasal-pasal yang berhubungan dengan kewenangan DPR antara lain pasal 5 (1), pasal 11, 20,21,22, dan hak warga Negara yang sama dibidang pemerintahan (pasal 27), identik pula dengan Pasal 21 (1) UDHR di atas.
- d) Ketentuan Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar, *bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya....*, identik dengan UDHR:

- 1) Pasal 6 (*recognition as a person before the law*) "*pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum*"
- 2) Pasal 7 (*equal protection of the law*) "*perlindungan hukum yang sama*"
- 3) Pasal 21 ayat 2 (*equal access to public service in one's country*) "*seseorang mendapatkan*



- akses publik yang sama dari negaranya*"
- 4) Pasal 1 (*equal in dignity and rights*) "sama dalam martabat dan hak-hak"
 - 5) Pasal 2 (*entitled to all rights and freedoms without distinction*) "berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan"
- e) Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar, bahwa tiap warga negara "berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", identik dengan ketentuan UDHR, antara lain :
- f) Pasal 28 Undang-Undang Dasar, yang menjamin "kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, identik dengan ketentuan UDHR:
- 1) Pasal 18: *the right to freedom of thought* (hak untuk bebas berpikir)
 - 2) Pasal 19: *the right to freedom of opinion and expression* (hak untuk berpendapat dan berekspresi)
- g) Pasal 29 (2) Undang-Undang Dasar yang menjamin kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Identik dengan ketentuan UDHR: Pasal 18: *the right to freedom of thought, conscience and religion (includes freedom to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance)*. (hak untuk kebebasan hati nurani dan agama).
- h) Pasal 30 (2) Undang-Undang Dasar, bahwa "tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara". Dapat identikkan dengan pasal 21 (1) UDHR, bahwa *"everyone has the right to take part in the goverment of his country"*. (setiap orang berhak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan negaranya)
- i) Pasal 31 (1) UUD menjamin hak warga Negara untuk mendapat pengajaran (pendidikan), identik dengan Pasal 26 (1) UDHR yaitu: *"the right to education"* (berhak untuk mendapatkan pendidikan)
- j) Pasal 32 Undang-Undang Dasar, bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia", mengandung didalamnya hak warga negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 (1) UDHR, yaitu *"the right to participate in the culture life of the community"* (berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan lingkungan)
- k) Kesejahteraan sosial yang diatur dalam pasal 33 undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat (3) memberikan hak kepada warga negara untuk memperoleh kemakmuran / kesejahteraan sosial yang sebesar-besarnya. Hal ini identik dengan ketentuan-ketentuan UDHR antara lain:
- 1) Pasal 22: *the right to social security* (berhak untuk mendapatkan keamanan sosial)
 - 2) Pasal 25: *the right to a standard of living and the right to security* (hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan hak untuk mendapatkan keamanan)
- l) Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung hak fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara oleh negara. Hal ini pun sesuai dengan ketentuan UDHR:
- 1) Pasal 22: *the right to social security*
 - 2) Pasal 25 (1): *the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, age or other circumstances beyond one's control* (hak untuk keamanan dalam keadaan pengangguran, sakit, janda, usia atau keadaan lain diluar kendali seseorang)
 - 3) Pasal 25 (2): *motherhood and children are entitle to special care and assistance. All children, wheather born in out of wedlock, shall enjoy the same social protection.* (ibu dan anak-anak berhak untuk perawatan dan bantuan khusus. Semua anak yang lahir diluar nikah akan menikmati perlindungan sosial yang sama),
- Rumusan hak tersebut mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tersebar dari pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan-rumusan dalam konstitusi itu amat terbatas jumlahnya dan



hanya dirumuskan secara singkat dan dalam garis besarnya saja. Sampai pada berakhirnya era Orde Baru tahun 1998, pengakuan hak asasi manusia di Indonesia tidak banyak mengalami perkembangan dan tetap berlandaskan pada rumusan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tertuang pada hak dan kewajiban warga negara.

Rumusan baru tentang hak asasi manusia tertuang dalam Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen I tahun 1999. Penambahan rumusan Hak Azasi Manusia ini bukan semata-mata kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan Hak azasi manusia yang semakin penting, melainkan juga merupakan salah satu syarat negara hukum. Hak Azasi Manusia juga dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara.

Dalam sejarah perkembangan Undang-Undang Dasar 1945, agenda perubahan Undang-Undang dasar merupakan sejarah baru bagi masa depan konstitusi Indonesia. Pengaturan Hak azasi manusia secara eksplisit ditegaskan pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2000. Muatan hak azasi manusia dalam perubahan kedua undang-Undang Dasar 1945 jauh melebihi ketentuan yang pernah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hak Azasi Manusia diatur dalam sebuah bab, Bab XA tentang Hak Azasi Manusia yang terdiri dari sepuluh Pasal, dari mulai Pasal 28A sampai dengan 28J.

Penjelasan yang pernah berlaku di Indonesia mengakui kedudukan Hak Azasi Manusia sangat penting. Hanya saja seluruh konstitusi itu berbeda dalam menerjemahkan materi muatan Hak Azasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 periode I (1945-1949) hanya menegaskan hak azasi warga (HAW). Pasal-Pasal HAW tersebut sarat dengan multiinterpretasi dalam penegakan hukum dan Hak Azasi Manusia. Konstitusi RIS 1949 (1949-1950) memberikan suasana baru bagi penegakan hukum dan hak azasi manusia. Kurun waktu

pemberlakuannya yang relatif singkat, akibatnya upaya penegakan hukum dan hak azasi manusia dari konstitusi ini relatif sulit ditemukan. Undang-Undang Dasar Serikat 1950 (1950-1959) memberikan kepastian hukum yang tegas tentang hak azasi manusia. Materi muatan hak azasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Serikat 1950 mengadopsi muatan hak azasi manusia PBB Tahun 1948.

Sama halnya dengan konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar Serikat 1950 nyaris tidak efektif karena negara pada waktu itu disibukkan dengan kondisi perpolitikan tanah air. Satu hal yang pasti, kedua Undang-Undang Dasar ini, Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar 1950 sama-sama memiliki materi muatan hak azasi manusia yang relatif komprehensif. Berlakunya kembali undang-Undang dasar 1945 semakin menjadi bukti adanya "kemunduran" normativitas Hak Azasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar. Majda El Muhtaj (2005; 67-69) Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada periode II (1959-1998) tidak jauh berbeda dengan materi muatan hak azasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 periode I.

Pengaturan Hukum terhadap Penegakan Hak Azasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor:39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia

1. Undang-Undang Nomor:39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia

Berdasarkan dari pengertian atau definisi yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999, bahwa Hak Asasi Manusia itu merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Esensi dari konsep hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi berdasarkan apa pun dan demi alasan apa pun, serta pengakuan



terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi.

Proses reformasi dewasa ini terutama akan perlindungan hak-hak azasi manusia semakin kuat bahkan merupakan tema sentral. Oleh karena itu jaminan hak-hak asasi manusia sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, menjadi semakin efektif terutama dengan diwujudkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:39 tahun 1999, tentang Hak Azasi Manusia. Dalam konsiderans dan ketentuan Umum Pasal I dijelaskan, bahwa Hak Azasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain hak asasi juga dalam Undang-Undang Nomor:39 tahun 1999 terkandung kewajiban dasar manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tersebut terdiri dari atas 105 pasal yang meliputi macam-macam hukum azasi, perlindungan hak asasi, pembatasan terhadap kewenangan pemerintah. KOMNAS HAM yang merupakan lembaga pelaksana atas perlindungan hak-hak azasi manusia. Demi tegaknya Hak Azasi Manusia setiap orang maka diatur pula kewajiban dasar manusia, antara lain kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, dan konsekuensinya setiap orang harus tunduk kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu juga diatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan serta memajukan hak-hak asasi manusia tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor:39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia tersebut bangsa Indonesia

telah masuk pada era baru terutama dalam mengakkan masyarakat yang demokratis yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kaelan (2010; 224-225) menyatakan namun demikian sering dalam pelaksanaannya mengalami kendala yaitu dilema antara penegakan hukum dengan kebebasan sehingga kalau tidak konsisten maka akan merugikan bangsa Indonesia sendiri.

Khusus membahas tentang Undang-Undang Nomor:39 Tahun 1999, menurut Budi Juliardi (2015;117-118) Hak Azasi Manusia yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan ini, antara lain:

- a. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu hak untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah.
- b. Hak untuk hidup, yang meliputi:
 - 1) Hak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupan
 - 2) Hak untuk hidup tentram, aman dan damai, dan
 - 3) Lingkungan hidup yang layak
- c. Hak mengembangkan diri yang meliputi:
 - 1) Hak untuk pemenuhan kebutuhan dasar
 - 2) Hak pengembangan diri
 - 3) Hak atas manfaat IPTEKS
 - 4) Hak atas komunikasi dan informasi
- d. Hak memperoleh keadilan, meliputi:
 - 1) Hak perlindungan hukum
 - 2) Hak atas keadilan dalam proses hukum
 - 3) Hak atas hukuman yang adil
- e. Hak kebebasan pribadi, meliputi:
 - 1) Hak untuk bebas dari perbudakan
 - 2) Hak atas keutuhan pribadi
 - 3) Kebebasan memeluk agama dan keyakinan politik
 - 4) Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul
 - 5) Kebebasan untuk menyampaikan pendapat
 - 6) Hak atas status kewarganegaraan
 - 7) Hak kebebasan untuk bergerak
- f. Hak atas rasa aman, meliputi:
 - 1) Hak untuk mencari suaka
 - 2) Hak perlindungan diri pribadi
- g. Hak atas kesejahteraan, meliputi:
 - 1) Hak milik
 - 2) Hak atas pekerjaan



- 3) Hak untuk bertempat tinggal secara layak
- 4) Hak jaminan sosial
- 5) Perlindungan bagi kelompok rentan
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan, meliputi:
 - 1) Hak pilih dalam pemilu
 - 2) Hak untuk berpendapat
- i. Hak wanita, meliputi:
 - 1) Hak penegmbangan pribadi dan persamaan dalam hukum
 - 2) Hak perlindungan reproduksi
- j. Hak anak, meliputi:
 - 1) Hak hidup anak
 - 2) Status warga negara anak
 - 3) Hak anak yang rentan
 - 4) Hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum
 - 5) Hak jaminan sosial anak.

2. Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa “pengadilan Hak azasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi Pengadilan Negeri yang bersangkutan”. Untuk Daerah khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Hak Azasi Manusia berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pengadilan Hak Azasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat, yang meliputi:

- a. Kejahatan genosida; yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,ras, kelompok etnis, dan kelompok agama.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan; salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan Hak Azasi Manusia atau pengadilan HAM adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Apa yang dimaksud dengan pengadilan HAM tersebut belum begitu jelas, meskipun penjelasan Pasal 1 menyebutkan “cukup Jelas”. Apa yang dimaksud dengan pengadilan HAM seperti yang ditentukan di dalam Pasal 1 angka 3 dengan pasal 2 yang menentukan bahwa pengadilan HAM merupakan pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum,dan Pasal 4 yangmenentukan bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, maka menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan HAM adalah pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja.

Saat ini yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan kalimat “dilingkungan Peradilan Umum” dalam Pasal 2. Yang dimaksud dengan kalimat “dilingkungan Peradilan Umum” dalam Pasal 2 tersebut adalah dilingkungan Peradilan umum seperti yang dimaksud oleh Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor:14 Tahun 1970. Seperti yang diketahui Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor:14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Penagdilan dalam Lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Terhadap ketentuan tersebut, penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor:14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa perbedaan dalam 4 lingkungan peradilan yang dimaksud tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan(diferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, pengadilan anak-



anak, pengadilan ekonomi, dan sebagainya dengan Undang-Undang.

Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa di masing-masing lingkungan peradilan dapat diadakan pengkhususan (*diferensiasi/ spesialisasi*) sesuai dengan kebutuhan mengenai cara memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu. Pada saat sekarang, Undang-Undang Nomor:14 Tahun 1970 sudah dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor:4 Tahun 2004 tetapi ternyata kemudian Undang-Undang ini juga dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970, sekarang menjadi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970 sekarang menjadi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 beserta penjelasannya.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Ibu Kota daerah Kota atau daerah kabupaten dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi (Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor:2 Tahun 1986), padahal Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kota atau daerah kabupaten, maka dapat diketahui bahwa pengkhususan (*diferensiasi/ spesialisasi*) hanya ada di Pengadilan Negeri saja, artinya pembentukan Pengadilan HAM hanya ada pada Pengadilan Negeri saja. Namun didalam Undang-Undang Nomor:26 Tahun 2000 tidak terdapat ketentuan tentang cara pembentukan Pengadilan HAM adhoc, yaitu dengan keputusan Presiden seperti yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat (2).

Seiring dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor:2 Tahun 1986 yang menentukan bahwa pengadilan negeri dibentuk dengan keputusan Presiden, maka di dalam praktik menunjukkan bahwa

cara pembentukan pengadilan HAM, juga dilakukan dengan keputusan Presiden, misalnya Keputusan Presiden Nomor:31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Makassar sebagai pelaksanaan dari pasal 45.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor:26 Tahun 2000 disebutkan bahwa dibentuknya pengadilan HAM tersebut dilaksanakan atas pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat merupakan "*extraordinary crimes*" dan berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerugian, baik materiel maupun imatriel yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
- b. Terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus, yaitu:
 - 1) Diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc.
 - 2) Diperlukan penegakan bahwa penyelidikan, hanya dilakukan oleh komnas HAM, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHP;
 - 3) Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;
 - 4) Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;



- 5) Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran HAM yang berat.

Secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor:26 Tahun 2000 pada Pasal 3 ayat (2) ditentukan bahwa untuk daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Ingat kita bahwa di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terdapat 4 Pengadilan Negeri, yaitu pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Jakarta Barat, dan Pengadilan Negeri Jakarta selatan, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 ayat (2), pengadilan HAM perlu dibentuk pada tiap-tiap Pengadilan Negeri yang ada di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Tetapi pada saat sekarang, pengadilan HAM yang ada di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang sudah dibentuk baru Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saja yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor:31 Tahun 2001.

Penegakan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu di Indonesia di era reformasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor:26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc harus dilakukan dengan keputusan Presiden (keppres) sehingga terbitlah Keppres Nomor: 53 Tahun 2001, yang diperbarui dengan Keppres Nomor:96 Tahun 2001.

Pembaruan Keppres tersebut dilakukan karena pemerintah menilai Keppres Nomor:53 Tahun 2001 mempunyai wilayah yurisdiksi yang terlalu luas (tidak membatasi secara spesifik wilayah dan waktu terjadinya peristiwa). Dengan Keppres Nomor:96 Tahun 2001, yurisdiksi pengadilan dipersempit, menjadi tiga wilayah saja, yaitu Liquica, Dili, dan Suai. Suatu peristiwa dibatasi yang terjadi antara bulan April dan September 1999. Sedangkan Locus dan tempus delicti kasus Tanjung Priok yang terjadi di Bulan September 1984, Suparman Marzuki (2012; 104).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor:26 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor:26 Tahun 2000, pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat meliputi:

- a) Kejahatan genosida
- b) Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama, dengan cara: membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 19 merumuskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang dimaksudkan menyerang secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a) Pembunuhan
- b) Pemusnahan
- c) Perbudakan
- d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- f) Peniksaan
- g) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan



yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional

- i) Penghilangan orang secara paksa
- j) Kejahatan apartheid

Pengadilan HAM mempunyai yurisdiksi terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 tersebut, Indonesia hanya menerapkan prinsip Yurisdiksi personal aktif saja, sedangkan hak menerapkan yurisdiksi personal pasif, apalagi prinsip yurisdiksi universal, tidak digunakan sebagaimana diberikan oleh hukum internasional

Ketentuan dalam Pasal tersebut hanya dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial, dalam arti tetap dihukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia ini. Sementara itu, warga negara Indonesia yang menjadi korban pelanggaran HAM berat di luar wilayah Republik Indonesia tidak mendapat perlindungan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal itu pula dapat diketahui bahwa Indonesia tidak sungguh-sungguh dalam memberantas tindak Pidana Internasional dalam pelanggaran Hak Azasi Manusia, Oentoeng Wahjoe (2011;159-160).

Pengadilan HAM ad hoc kasus Timor-Timur serta kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya, telah menjadi fakta tentang kegagalan intitusi dan aparaturnya penegak hukum HAM dalam menegakkan profesionalitas dan independensinya, gagal memaknai kasus Pelanggaran HAM, mencari, menghadirkan serta menilai fakta-fakta, menerapkan hukum, dan menjatuhkan putusan-putusannya. Seluruh proses hukum pelanggaran HAM itu pada akhirnya bukan menjadi mekainsme untuk mengadili, tetapi untuk mengakhiri.

Proses hukum HAM yang telah dilakukan tersebut memberi inspirasi bahwa penegakan hukum tidak bisa

dianalisis terpisah dari pembuatan hukum HAM, institusi penegakan hukumnya, serta penerapannya oleh manusia-manusia pelaksana hukum itu di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Ketiganya berkaitan dan harus dijelaskan secara komprehensif. Produk hukum HAM, institusi pelaksana hukum HAM, dan manusia pelaksana hukum HAM adalah elemen-elemen rangkaian penegakan hukum yang saling mempengaruhi ada tidaknya proses hukum yang fair, adil, dan transparan dalam menangani kasus pelanggaran HAM tersebut.

Hak-hak asasi manusia di dalam UDHR dapat dikategorikan dalam dua kelompok hak, yaitu:

- 1) Yang termasuk "*civil and Politcal Right*" meliputi:

- a. *Life, liberty, and security of person* (pasal 3)
- b. *Freedom from slavery and servitude* (pasal 4)
- c. *Freedom from tortune and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment* (pasal 5)
- d. *Recognition as a person before the law* (pasal 6)
- e. *Equal protection of the law* (pasal 7)
- f. *And effective judicial remedy for violations an independent and impartial tribunal* (pasal 10)
- g. *The presumption of innocence until guilt has been proved* (pasal 11 ayat 1)
- h. *Debarmant from conviction for an act which was not a penal offence at the time it was commited* (pasal 11 ayat 2)
- i. *Freedom from arbitrary interference with privacy, family home or correspondence* (pasal 12)
- j. *Freedom of movement and residence, including the right to leave any country and to return to one's country* (pasal 13)
- k. *Asylum* (pasal 14)
- l. *A natinality* (pasal 15)
- m. *Contrac a marriage and found a family* (pasal 16)
- n. *Own property* (pasal 17)
- o. *Freedom of thought, conscience and religion* (pasal 18)



- p. *Freedom of opinion and expression* (pasal 19)
 - q. *Freedom of peaceful assembly and association* (pasal 20)
 - r. *Participation in the government of one's country* (pasal 21 ayat 1)
 - s. *Equal access to public service in one's country* (pasal 21 ayat 2)
- 2) Yang termasuk "economic, social and culture rights" meliputi:
- a. *Social security* (pasal 220)
 - b. *Work and free choice of employment* (pasal 23 ayat 1)
 - c. *Equal pay for equal work* (pasal 23 ayat 2)
 - d. *Just and favourable remuneration insuring an existence worth of human dignity* (pasal 23 ayat 3)
 - e. *Form and join trade unions* (pasal 23 ayat 3)
 - f. *Rest and leisure* (pasal 24)
 - g. *A standard of living adequate for health and well-being (including food, clothing, housing, and medical care)*-(pasal 25 ayat 1)
 - h. *Right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other circumstance beyond one's control* (pasal 25 ayat 1)
 - i. *Protection of motherhood and childhood* (pasal 25 ayat 2)
 - j. *Education, with parents having a prior right to choose their children's type of education* (pasal 26 ayat 1)
 - k. *Participation of the culture life of one's community* (pasal 27 ayat 1)
 - l. *Protection of the moral and material interest resulting from one's authorship of scientific, literary or artistic productions* (pasal 27 ayat 2).
- Seberapa jauh hak-hak diatas terwujud dan mendapat jaminan hukum dalam Perundang-Undangan lain (di luar UUD), dapat diidentifikasi sebagai berikut:
- 1) Yang berhubungan dengan (*civil and Political Rights*)
- a. Di dalam TAPMPR Nomor:II/ MPR/ 1987 mengenai "pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila" (*ekaprasetia Pancakarsa*) ditegaskan, bahwa: "dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial" Pernyataan demikian, dapat diselaraskan dengan konsepsi dasar yang tertuang di dalam alenia "preamble" UDHR dan Pasal 1 UDHR seperti telah dikemukakan diatas.
 - b. Didalam Undang-Undang Nomor:62 Tahun 1958 tentang "kewarganegaraan Republik Indonesia", antara lain dinyatakan, bahwa kewarganegaraan RI dapat hilang karena kemauan sendiri (pasal 17 sub a). Hal ini selaras dengan Pasal 15 UDHR
 - c. Didalam Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1969 tentang "pemilihan Umum" diatur hak warga negara untuk memilih dan di dalam undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1985 tentang "organisasi kemasyarakatan" ditegaskan mengenai hak warga negara untuk menjadi anggota ORMAS (pasal 9). Ketentuan-ketentuan demikian, selaras dengan Pasal 20 dan 21 UDHR.
 - d. Didalam Undang-Undang Nomor:11 Tahun 1966 (ketentuan-ketentuan pokok pers), antara lain dinyatakan, bahwa "kebebasan pers sesuai dengan hak azasi warga negara dijamin" (pasal 5:1). Hal ini sesuai dengan Pasal 29 UDHR.
 - e. Didalam Undang-Undang Nomor:14 Tahun 1970 (ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman) antara lain dinyatakan:
 - (a) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka (Pasal 1 ayat1)
 - (b) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat 1)
 - (c) Tiada seorang pun dapat dihadapkan di depan



- pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 6 ayat 1)
- (d) Tiada seorang pun dipidana kecuali pengadilan mendapat keyakinan bahwa seseorang telah bersalah (Pasal 6 ayat 2)
 - (e) Tiada seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan selain menurut Undang-undang (Pasal 7)
 - (f) Tiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan tetap yang menyatakan kesalahannya (Pasal 8)
 - (g) Seorang yang ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa alasan berdasar Undang-Undang atau karena kekeliruan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9)
 - (h) Tiap orang berhak memperoleh bantuan hukum (Pasal 35)
- 2) Yang berhubungan dengan *economic, social, dan Cultural rights*
- a) Jaminan kesejahteraan sosial seperti disebut dalam Pasal 22 dan 25 UDHR, terlihat antara lain di dalam:
 - (a) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1974 (ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial) menegaskan, bahwa tiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. (Pasal 1)
 - (b) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1979 (kesejahteraan anak) menegaskan, bahwa:
 - (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasar kasih sayang untuk tumbuh dan berkembang secara wajar; (Pasal 2:1)
 - (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuannya dan kehidupan sosial (Pasal 2:2)
 - (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan semasa dalam kandungan atau sesudah dilahirkan (Pasal 2:3)
 - (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar (Pasal 2:4)
 - (5) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan (Pasal 4:1)
 - (c) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 1960 (pokok-pokok kesehatan) menegaskan bahwa tiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Pasal 1)
 - (d) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1964 (pokok-pokok perumahan) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh dan menikmati perumahan yang layak (Pasal 1:1)
 - (e) Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1981 (pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin) menegaskan, bahwa fakir miskin berhak mendapat pelayanan kesejahteraan sosial (Pasal 2:1)
 - (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 (ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja) menegaskan, bahwa tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama (Pasal 9).



- b) Hak-hak para pekerja di dalam memilih pekerjaan, memperoleh upah dan istirahat/ libur yang secara khusus diatur dalam Pasal 23 dan 24 UDHR, terlihat antara lain di dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- (1) Undang-Undang nomor: 14 Tahun 1969 antara lain menegaskan:
 - (a) Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 3)
 - (b) Tiap tenaga kerja bebas memilih dan/ atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya
 - (2) Undang-Undang Nomor: 80 Tahun 1957 menegaskan persetujuan terhadap Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Hal ini pun ditegaskan di dalam PP Nomor: 8 tahun 1981, bahwa tidak ada diskriminasi upah antara buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan
 - (3) Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1961 menegaskan persetujuan terhadap Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional mengenai istirahat mingguan.
- c) Hak pertama pada orang tua dalam menentukan/ memilih jenis pendidikan untuk anak-anaknya yang tertuang dalam Pasal 26 UDHR, terlihat secara lebih luas di dalam perumusan Pasal 9 Undang-Undang Nomor:4 Tahun 1979 (tentang kesejahteraan anak) yang menegaskan, bahwa orang tua yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial
- d) Perlindungan terhadap hak cipta di bidang keilmuan, kesusasteraan dan kesenian seperti tertuang dalam Pasal 27 UDHR, terlihat di dalam Undang-Undang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo. Undang-Undang Nomor:7 Tahun 1987 yang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor:19 Tahun 2002.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

Ambarwati, 2014, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Study Hubungan Internasional* Raja, Grafindo Persada, Jakarta.

Arief Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* Prenada Media. Jakarta

Juliardi Budi, 2015 *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marzuki Suparman, 2012, *Pengadilan HAM Di Indonesia melanggar Impunity*. Erlangga. Jakarta

Muhtaj El Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Wahjoe Oentoeng, 2011, *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional & proses penegakannya*. Erlangga. Jakarta

Winarno, 2013, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*. Bumi Aksara. Jakarta

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31

INTERNET

<http://Bayuanggono.blogspot.co.id> diakses tanggal 11_Mei_2016

